

Membangun Manajemen Madrasah

Oleh Sri Haningsih

Pendahuluan

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Departemen Agama, selama ini masih dipandang rendah kualitasnya oleh sebagian masyarakat. Padahal, rentang waktu perjalanan madrasah di Indonesia sangatlah panjang dan dapat dikatakan hampir sama dengan dinamika pendidikan di Indonesia. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesungguhnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh *stakeholder* madrasah dalam upaya mengembangkan kualitas agar *citra* sekolah ini tidak selalu "nomor dua" setelah sekolah umum.

Sejalan dengan perkembangan global, pendidikan Islam seperti madrasah, menghadapi tantangan manajerial yang cukup mendasar. Harapan dari berbagai pihak agar pendidikan dikelola dengan pola "*industri pendidikan*", merupakan salah satu perkembangan yang muncul dalam era kompetitif saat ini. Manajemen pendidikan tidak lagi bisa dianggap sebagai "*manajemen sosial*" yang bebas dari keharusan pencapaian target dan dikendalikan oleh subyek yang berwewasan sempit.

Sesuatu yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan Islam (madrasah) adalah pola *manajemen strategik*. Ini dapat didefinisikan sebagai se-

kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan dalam hal ini disebut dengan *madrasah* (Agus Maulana MSM, 1997:20).

Dalam konteks pendidikan madrasah, apabila penerapan "*manajemen instruksional*" dirumuskan dalam pola-pola praktis yang *kaku* oleh pemegang kebijakan, akan mengakumulasikan kerawanan masalah. Seperti proses pembelajaran yang kurang memadai, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang tidak profesional dan lain sebagainya. Membiarkan pola seperti ini berkembang (tanpa ada solusi alternatif menuju perkembangan madrasah ke depan), maka pada saatnya nanti akan mengancam eksistensi madrasah itu sendiri.

Sisi yang terpenting dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan manajemen madrasah adalah dengan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap seluruh potensi yang dimiliki stakeholder. Kemudian secara bersama menyusun program dan rencana pengembangan madrasah secara bertahap serta meneguhkan kembali *komitmen* stakeholder atas pentingnya pendidikan Islam (madrasah) dalam rangka mempersiapkan subyek didik yang cerdas, bermoral dan memiliki keterampilan, sehingga dapat

memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan zaman.

A. Manajemen dalam Sistem Pendidikan Modern

Para ahli dimanapun juga, bersepakat bahwa pendidikan merupakan suatu modal yang sangat penting bagi suatu bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) untuk kebutuhan pembangunan di segala bidang. Arah dan tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mencapai suatu bentuk kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya, dengan mengejar ketertinggalan di berbagai bidang sesuai tahapan-tahapan tertentu.

Atas pemahaman tersebut di atas, para pakar pendidikan mengambil langkah-langkah menuju perbaikan sistem pendidikan tradisional menuju sistem pendidikan modern yang dilengkapi dengan pola manajemen sebagai standar mutu. Bagi masyarakat luas, madrasah dianggap sebagai salah satu pendidikan yang bercirikan "tradisional", sehingga kiat-kiat untuk menepis anggapan masyarakat tersebut di atas diperlukan manajemen yang tertata dalam sistem pendidikan modern.

Sebagaimana dikatakan Winardi (2002 : 61), bahwa istilah manajemen merupakan sebuah seni kuno yang pernah dipraktikkan oleh raja-raja, perdana menteri pada masa lampau. Saat ini, manajemen diterapkan dan dimanfaatkan oleh para eksekutif bisnis, birokrat dalam pemerintahan, termasuk di dalamnya para pakar dan praktisi pendidikan. Di era global saat ini dapat dilihat dengan jelas, bahwa manajemen memasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, karena manajemen dipandang berkaitan

dengan individu, kesatuan keluarga, perusahaan, badan pemerintah, organisasi-organisasi, dan lembaga pendidikan.

Hampir setiap orang merupakan manajer dalam fase tertentu kehidupannya sehari-hari. Masing-masing di antara kita perlu memenej waktu dan sumber-sumber daya lainnya, sehingga boleh dikatakan bahwa semua orang mengetahui "sesuatu" tentang manajemen.

Memiliki pengetahuan yang luas tentang manajemen, berarti memiliki peluang untuk maju. Tetapi bagi seorang pendidik manajemen, ini juga merupakan kendala, karena ia berhadapan dengan sebuah topik yang sudah dikenal oleh para pendengarnya, sehingga tidak jarang ia perlu menghadapi pandangan dan persepsi yang seringkali menyesatkan.

Untuk mengantisipasi permasalahan dalam pendidikan yang "menyesatkan", perlu ditempuh langkah-langkah konkrit sebagai suatu metode mengembangkan konsep manajemen dengan sejumlah kriteria yang dapat diobservasi, yang apabila dipenuhi, memberikan petunjuk bahwa terdapat sebuah lingkungan manajemen. Adapun kriteria yang berkaitan dengan konsep manajemen, dikemukakan oleh Winardi (2002: 62-66) sebagai berikut:

1. Aktivitas yang terorganisasi, kriteria pertama yang dapat diobservasi yang berkaitan dengan manajemen adalah bahwa ia merupakan sebuah proses yang terorganisasi. Kelompok orang-orang terlibat dalam hal bekerja menuju kearah pencapaian tujuan bersama.

Aktivitas yang terorganisasi tersebut dapat mencapai aneka macam bentuk yang berkisar sekitar sebuah organisasi yang terstruktur ketat, seperti misalnya madrasah, di antara stakeholdernya ada

yang memegang peranan sebagai atasan (pemimpin). Sedangkan yang lainnya bertindak sebagai bawahan (staf), sebagai teman sekerja atau kolega, tetapi pada semua kasus semua pihak berkepentingan terhadap hasil atau produk dari aktivitas yang dilaksanakan. Proses manajemen dalam situasi seperti ini, dimanfaatkan untuk menimbulkan suatu upaya terkoordinasi dari sekian banyak individu dan sub kelompok-kelompok (stakeholder) madrasah tersebut.

2. Sasaran (target yang ingin dicapai), kriteria operasional kedua adalah bahwa terdapat sebuah sasaran (obyek) ke arah mana aktivitas kelompok yang terorganisasi diarahkan. Seperti halnya madrasah sebagai lembaga pendidikan, menyatukan sasaran atau misinya dengan metode yang *capable* dan *marketable* serta bisa dipertanggungjawabkan.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang relatif lebih muda dibanding pesantren, berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada.

Pembaharuan tersebut meliputi tiga hal, yaitu, (a) usaha menyempumakan sistem pendidikan pesantren, (b) penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan (c) upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren, madrasah dan sistem pendidikan Barat (Mastuhu, 1999:226).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Di dalam salah satu dikum surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri)

disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan ke sekolah-sekolah umum, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

3. Aktivitas yang berorientasi pada tujuan, perlu dicapai melalui jalan menetapkan hubungan-hubungan tertentu antara sumber daya yang tersedia (sumber daya material dan moneter). Hubungan-hubungan tersebut berkembang dengan sebuah pola yang berubah secara konstan yang merefleksikan fakta tentang bagaimana orang-orang bekerja satu sama lain, dan bagaimana mereka dipengaruhi satu sama lain dalam kehidupan keorganisasian mereka.

4. Tindakan bekerja melalui pihak lain, untuk mencapai sasaran-sasaran keorganisasian. Untuk memperoleh manfaat hasil yang maksimum, baik dari bakatnya sendiri maupun bakat pihak lainnya, diperlukan pembagian kerja yang jelas, penugasan atau tanggungjawab bidang-bidang terbatas kepada individu atau kelompok-kelompok.

5. Keterlibatan aktif dengan keputusan-keputusan, evaluasi dan seleksi alternatif atau problem-problem keputusan manajerial. Dalam jangka panjang, seluruh masa depan suatu lembaga pendidikan, termasuk madrasah, bergantung pada tingkat hingga di mana keputusan-keputusan tepat diambil oleh para manajemnya.

Sistem pendidikan madrasah di masa datang, diharapkan merupakan suatu "industri" dalam arti bahwa pendidikan memerlukan pengelolaan yang professional, agar "rate of returns" dari industri pendidikan itu sama, atau setidaknya tidaknya lebih

baik dari investasi dalam sektor-sektor ekonomi lainnya.

Manajemen Madrasah

Sebagaimana disebutkan Mastuhu (1999: 59), bahwa kelemahan sistem pendidikan madrasah pada dasarnya sama dengan kelemahan umum yang disandang oleh sistem pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mementingkan materi di atas metodologi, (2) mementingkan memori di atas analisis dan dialog, (3) mementingkan pikiran vertikal di atas literal, (4) mementingkan penguatan pada "otak kiri" di atas otak "kanan", (5) materi pelajaran agama yang diberikan masih bersifat tradisional dan belum menyentuh aspek rasional, (6) pemahaman yang berlebihan pada ilmu sebagai produk final, bukan pada proses metodologinya; dan (7) mementingkan orientasi "memiliki" di atas "menjadi".

Berangkat dari faktor-faktor tersebut di atas, pada kenyataannya out put madrasah belum mampu bersaing dengan out put sekolah-sekolah umum dalam memasuki perguruan tinggi umum dan lapangan kerja. Gambaran pada aspek-aspek ini menunjukkan bahwa madrasah belum dapat "menyamai" sekolah umum yang lainnya, meski kehadiran sistem pendidikan madrasah di tengah-tengah sistem pendidikan nasional sangat penting. Sebab, melalui sistem pendidikan madrasah diharapkan dapat diletakkan dasar-dasar model pemikiran Islami yang kelak di perguruan tinggi dapat dikembangkan.

Perbedaan mendasar antara sistem pendidikan madrasah dengan sistem pendidikan umum, jelas menunjukkan masih adanya dikhotomi antara ilmu

agama dengan ilmu umum (Mastuhu, 1999: 58). Di samping itu, penerapan suatu kurikulum baru yang sesuai dengan tuntutan terkesan lambat, karena jauh sebelumnya sekolah yang bersangkutan sedang menggunakan kurikulum lama.

Sebagai upayaantisipasi kelemahan-kelemahan manajemen madrasah tersebut, Mulyasa (2003:19) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan yang diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang sistematis, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diperlukan beberapa usulan perbaikan. Keberadaan pendidikan madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional, perlu dipertahankan dan dikembangkan. Pendidikan ini akan mampu memberikan sumbangan yang berarti jika disertai dengan *metodologi modern dan Islami*.

Senada dengan hal tersebut, Mastuhu (1999:61) mengemukakan usulan perbaikan manajemen madrasah, dengan mengadakan guru yang mampu mendidik dan mengajar dengan metodologi yang sesuai dengan tantangan zaman peseta didik. Ini meliputi, *pertama*, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, *kedua*, setiap mata pelajaran di sekolah manapun harus dilihat dari dua sisi (sebagai alat dan tujuan). Misalnya mata pelajaran biologi, dapat dijadikan sebagai alat menumbuhkembangkan imtaq (iman dan taqwa), tetapi juga sebagai tujuan dasar pengembangan ilmu kedokteran. *Ketiga*, membudayakan penggunaan istilah baru sebagai pengganti istilah-istilah lama yang bemuansa dikotomi. *Keempat*, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah berada dalam dinamika sistem yang melengkapi satu sama lain.

C. Strategi Pengembangan Manajemen Pendidikan Madrasah

Seiring dengan proses perkembangan dan orientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, strategi yang dianut sistem pendidikan Islam Indonesia (madrasah), tampak masih menjadikan dirinya sebagai alternatif untuk dipilih. Selama ini, *image* masyarakat terhadap madrasah adalah sebagai sekolah yang penuh dengan beban bahasa Arab dan tulisan Arab yang terkesan sulit dan tidak menarik. Akibatnya, madrasah hanya dijadikan alternatif pilihan ketiga atau bahkan keempat setelah ke mana-mana tidak diterima. *Image* seperti ini harus diluruskan dengan mempertegas dan mensosialisasikan visi dan misi madrasah.

Signifikansi visi dan misi madrasah sangat ditentukan oleh faktor manajerial dan profesionalitas SDM (stakeholder) madrasah. Perlunya profesionalitas manajemen dan SDM seperti itu, karena lembaga pendidikan di era global ibaratnya sebuah industri. Pemikiran seperti ini sesuai dengan rekomendasi perkembangan pendidikan.

Ibarat sebuah industri, menurut Qodri (2002:115), lembaga pendidikan madrasah berusaha mengolah para peserta didiknya sebagai *in-put* untuk dididik menjadi manusia terdidik sesuai tujuannya sebagai *out-put* dari proses pendidikan. Tuntutan profesionalitas manajerial madrasah seperti dalam pengelolaan industri itu, diperlukan karena peta permasalahan pendidikan kita sangat kompleks. Ini bukan saja menyangkut masalah teknis pendidikan saja, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pendanaan dan efisiensi serta sistem itu sendiri. Namun perlu ditegaskan, bahwa peranan

pendidikan jauh lebih besar dari industri, karena pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri.

Bagi masyarakat madrasah, menyebut atau mendengar istilah "*memasarkan madrasah*" atau secara umum istilah pemasaran (*marketing*), mungkin masih dianggap sebagai hal yang tabu, bahkan asing. Namun setidaknya ada 3 hal yang menuntut komunitas madrasah harus akrab atau bahkan harus melakukan aktivitas "*memasarkan madrasah*" secara strategik, sebagai realisasi strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah. Ketiga hal tersebut adalah :

Pertama, masyarakat luas masih banyak yang belum tahu (mengenal) apa visi dan misi madrasah. Oleh karenanya, sosialisasi atas hal tersebut akan merupakan bagian dari strategi "pengenalan" eksistensi madrasah secara sebenarnya.

Kedua, arus (*mainstream*) globalisasi memaksa semua aspek kehidupan tersebut pada apa yang disebut "mekanisme pasar", termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan. Artinya, segala sesuatu akan terikat pada hukum *supply* dan *demand* yaitu hukum keseimbangan antara penawaran (persediaan) dan permintaan. Pendidikan sebagai sebuah "*produk jasa*" tentunya juga tidak bisa terbebas dari hukum tersebut, seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan.

Ketiga, dampak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah, berakibat terhadap munculnya isu tentang otonomi pendidikan yang

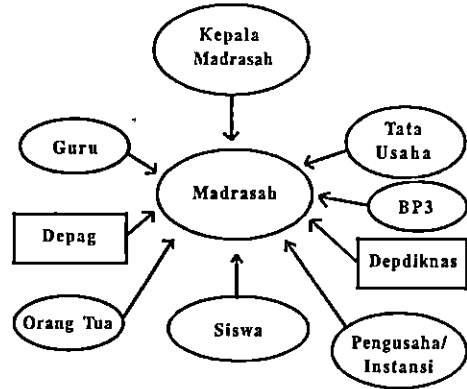
di dalamnya digunakan pendekatan *School Based Management* (SBM), yang lebih menuntut adanya peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga hal di atas, berdampak pada munculnya kewenangan (otonomi) yang luas pada level institusi paling rendah (sekolah/madrasah). Dengan semakin luasnya kewenangan tersebut, sekolah tidak semata-mata terikat pada juklak dan juknis dari atas, tetapi justru lebih leluasa untuk menggelindingkan dan mengembangkan sekolah secara lebih dinamis, produktif, inovatif dan antisipatif. Salah satu hal yang penting dalam proses manajemen modern madrasah adalah bagaimana “memasarkan madrasah”.

Dalam khasanah manajemen, ada satu kaidah yang dikenal dengan istilah *marketing mix* yang terdiri dari 4P yaitu *Product*, *Price*, *Place*, dan *Promotion*. Untuk pendidikan, kurang lebih dapat dianalogikan sebagai berikut; yaitu : jasa pendidikan layak dipasarkan apabila produknya memenuhi standar kualifikasi mutu, *price* (harganya) melawan, terjangkau dan sesuai dengan mutu *product*, *place* (tempat) berada pada tempat strategis, misalnya transportasi mudah, nyaman dan kondusif untuk belajar dan akhirnya harus dilakukan promosi yaitu langkah-langkah memasarkan secara sistematis, terencana dan secara *smart*.

Selanjutnya apa yang harus dilakukan madrasah dalam mengelola *marketing mix* tersebut? Untuk keperluan ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dan meningkatkan pemahaman tentang *stakeholder* madrasah yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap madrasah, seperti yang

tergambar dalam diagram berikut :



Pemahaman terhadap *stakeholder* madrasah sangat penting, karena masing-masing pihak menjadi jelas akan posisi dan perannya terhadap madrasah serta kompeten akan hak dan kewajibannya terhadap madrasah. Dari diagram di atas nampak, bahwa ada pihak-pihak yang kepentingannya “melayani” yang termasuk di sini adalah kepala madrasah, guru, karyawan tata usaha dan pengurus BP3.

Pihak-pihak tersebut, terutama kepala madrasah dan guru, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan pendidikan di madrasah. Sedangkan pihak-pihak yang kepentingannya “dilayani” adalah siswa, orangtua siswa maupun para pengusaha/instansi yang memanfaatkan *output* madrasah. Adapun Departemen Agama dan Depdiknas merupakan “mitra kerja” madrasah dalam proses pelayanan terhadap *customer*.

Dengan memahami *Stakeholder* selanjutnya dapat dilakukan penataan internal di antaranya melalui analisis SWOT

secara periodik seberapa jauh kekuatan (*Streng*), kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki serta peluang (*Opportunity*) yang dapat diraih maupun ancaman yang akan terjadi (*Threat*).

D. Prospek Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Alternatif

Secara yuridis, keberadaan madrasah dijamin oleh Undang-Undang. SKB tiga menteri (Menag, Mendikbud dan Mendagri) Tahun 1975 bahkan menetapkan kedudukan madrasah sama dan sejajar dengan sekolah formal lainnya. Demikian juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan ulang bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Kurikulum yang digunakan pun secara umum mengacu kepada kurikulum Dinkas dan ditambah kurikulum agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Oleh karena itu, secara teoritis madrasah seharusnya mampu memberikan nilai lebih bagi para siswanya dibanding sekolah umum (Miftahul Haq, 2002:26).

Munculnya hambatan atas persoalan di atas, lebih disebabkan karena madrasah tidak hanya menawarkan peserta didiknya memiliki kematangan intelektual semata melainkan juga menawarkan menjadikan peserta didiknya memiliki kematangan mental dan spiritual. Padahal madrasah belum menunjukkan kesiapan yang matang untuk mewujudkan hal tersebut secara meyakinkan.

Dalam konteks tersebut, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dinilai masih relatif lebih muda dibanding pesantren dan mempunyai pengalaman pendidikan yang lebih panjang. Madrasah "lahir" pada abad 20, bersama

dengan munculnya madrasah Mamba'ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1903 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 (Qodri, 2002 : 226).

Namun dalam perkembangan terakhir, terlihat bahwa persepsi masyarakat terhadap madrasah di era modern belakangan ini semakin menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan dan di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak semakin dibutuhkan.

Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi madrasah, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarannya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menjadikan madrasah sebagai "sapi perah", madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya. Ini menjadi salah satu dasar *pilihan* bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi.

Menurut Qodri (2002:230), madrasah sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, telah menjadikannya sangat fleksibel untuk diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang yang

asing, karena memang lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai audio visual aids, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan eksklusif yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi sedikit terkikis.

Masyarakat metropolitan tampak makin tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan madrasah, baik mereka yang sekadar berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang baik (agamis) hingga yang benar-benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren/madrasah tersebut. Orang makin berebut untuk mendapatkan fasilitas di sana. Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo misalnya, penuh dengan putra-putri konglomerat, seperti juga Ma'had Al-Zaitun Indramayu dan yang lain, kini telah bermunculan di berbagai daerah.

Melihat kenyataan seperti itu, maka tuntutan untuk pengembangan madrasah akhir-akhir ini dirasa cukup tinggi. Pengembangan madrasah yang pada umumnya berlokasi di luar kota, dirasa tidak cukup memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, banyak bermunculan model pendidikan madrasah di tengah kota. Meskipun banyak madrasah yang berkembang di luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas sebuah lembaga pendidikan Islam. Etika pergaulan, perilaku dan performance pikiran para santrinya menjadi daya tarik tersendiri, yang menjanjikan kebahagiaan

hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam.

Oleh karena itu, melihat animo masyarakat yang demikian, maka seyogyanya pengembangan madrasah tidak hanya dilakukan secara kuantitatif, tetapi juga dengan peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Manajemen profesional telah menjadi andalannya di sekolah-sekolah pada umumnya dan dengan demikian perlu diikuti dengan pembenahan manajemen di Madrasah. Pembagian kewenangan yang jelas antara tenaga spiritualitas (kiyai) dan manajer administratif, akan mendukung terciptanya suasana kerja yang harmonis.

Keberadaan madrasah di pusat-pusat kota tampil dengan inovasi baru, meskipun dengan menggunakan nama lain, misalnya *Taman Pendidikan Islam Al-Azha*. Namun nuansa keislamannya justru makin kentara, demikian juga *Taman Pendidikan Islam "Bina Anak Soleh" (BIAS)* Yogyakarta. Munculnya sekolah-sekolah semacam madrasah tersebut, sengaja ditampilkan elit dan mewah, agar tidak terkesan kumuh, terbelakang, marginal, sebagaimana pada umumnya. Dengan cara demikian, maka Islam dapat dimasuki pada semua masyarakat dengan strata sosial yang berbeda-beda.

Bagaimanapun juga madrasah semakin ditanggapi positif oleh masyarakat modern. Mereka bukan saja tidak alergi mendengar sebutan madrasah, tapi lebih dari itu, bahwa kehadiran madrasah telah menjadi bagian dari keperluan hidupnya. Masyarakat modern yang notabenehnya sibuk di luar rumah dan tidak memiliki kesempatan membimbing sendiri putra-putrinya, merasa lebih mantap agar putra-putrinya bersekolah di madrasah. Kalau

pada tahun 70-an masih banyak orang memandang madrasah dengan sebelah mata, kini orang menyebut madrasah sebagai "Sekolah Plus", karena di samping memberikan materi umum, juga menamakan ajaran agama yang tidak terbatas pada ranah kognitif, tetapi juga masuk pada tataran etika, moral dan tingkah laku (afektif).

Tinggal sekarang bagaimana meramu, memperbaiki, mengembangkan dan memberdayakan madrasah agar benar-benar dapat setara kualitasnya dengan sekolah. Kesetaraan kualitas, maka berarti kita telah mengantarkan madrasah pada satu keunggulan yang hakiki, karena ia berada dalam lingkungan umat yang besar di negerinya sendiri.***

Dra. Sri Haningsih, M.Ag., Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah FIAI UII Yogyakarta dan Pembantu Dekan II FIAI UII Yogyakarta 2001-2005.

Kepustakaan

Agus Maúlana, MSM dalam Pearce Robinson, 1997, *Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Binarupa Aksara: Jakarta.

Hidayatullah Arifin, 2001, *Bakti*, No. 120. Th. XI.

Mastuhu, 1999, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, PT. Logas Wacana Ilmu: Ciputat.

Miftahul Haq, 2002, *Bakti*, No. 130. Th. XI.

Mulyasa, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep Strategi dan Implementasi)*, Rosda Karya: Bandung.

Qodri Abdillah Azizy, 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Pusataka Pelajar. Yogyakarta.

Winardi, 2002, *Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju: Bandung.